

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan kasus yang diambil dari PT. X, perusahaan yang bergerak di bidang kuliner yang memiliki pegawai yang pindah cabang, perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai sebelum dan setelah pindah cabang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nurlaila merupakan salah satu pegawai yang dipindah tugaskan dari cabang Waru ke cabang Tegalsari mulai bulan Mei 2018. Sebelum dipindah tugaskan, Nurlaila masih bekerja di cabang Waru pada bulan Januari sampai dengan April 2018, sehingga kewajiban atas pencatatan gaji dan penghitungan PPh 21 masih menjadi tanggung jawab dari cabang Waru. Untuk penghitungan jumlah penghasilan neto yaitu total gaji dan tunjangan yang telah dikurangkan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun pada bulan Januari-April dan dianggap setahun, bukan disetahunkan karena pegawai dipindah tugaskan ke cabang lain, bukan pindah tempat kerja atau resign. Sehingga pada bukti potong yang dibuat oleh cabang Waru, masa perolehan penghasilannya adalah masa 1-4, yang berarti masa Januari sampai April dan bukti potong tersebut dibuat pada tanggal 30 April 2018.
2. Pada bulan Mei sampai dengan Desember 2018, Nurlaila telah dipindah tugaskan ke cabang Tegalsari, maka kewajiban atas pencatatan gaji dan penghitungan PPh 21 berpindah dari cabang Waru ke cabang Tegalsari. Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh 21 yaitu total gaji dan tunjangan yang telah dikurangkan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun pada bulan Mei sampai dengan Desember 2018, dan ditambah dengan penghasilan neto masa sebelumnya yang merupakan penghasilan masa Januari-April dari cabang Waru. Bukti potong untuk Nurlaila setelah pindah cabang dibuat pada akhir Desember 2018 untuk masa perolehan

penghasilan 05-12 yang berarti untuk masa Mei sampai dengan Desember 2018.

### **3.2 Saran**

Mengetahui berbagai permasalahan yang muncul pada suatu perusahaan yang beraneka ragam, sebelumnya kita harus memahami jenis-jenis perusahaan dan bidang yang ditekuni perusahaan tersebut, karena dengan begitu akan lebih mudah untuk menentukan penggunaan aturan perpajakan bagi perusahaan tersebut nantinya. Yang tidak kalah penting adalah memahami berbagai aturan perpajakan yang selalu diperbaharui, khususnya aturan-aturan perpajakan mengenai PPh 21. Maka kesalahan teknis akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan dapat dihindari.